

PENGANTAR REDAKSI

Tahun 2010 mempunyai makna penting, yaitu: mengantarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memasuki dasawarsa kedua. Selama satu dasawarsa terakhir, capaian dan masalah, kemajuan dan hambatan, keberhasilan dan kegagalan, ataupun bahkan apresiasi dan sinisme, serta optimisme dan pesimisme atas masa depan otonomi daerah telah menjadi bagian dari wacana, pelaksanaan dan sikap terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah selama masa reformasi ini.

Terlepas dari aspek-aspek positif dan negatif yang menyertai, kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya telah membuka jalan bagi perubahan paradigmatik pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dari yang bersifat *top down* pada masa Orde Baru menjadi *bottom up* pada masa reformasi. Karena itu, keberhasilan masa depan Indonesia bukan lagi ditentukan oleh Pemerintah Pusat (“Jakarta”) semata, melainkan juga oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh daerah itu sendiri. Tetapi ini juga dapat berarti sebaliknya, yakni: kegagalan masa depan Indonesia akan disebabkan terutama oleh kegagalan daerah menyelenggarakan otonominya.

Dalam memasuki dasawarsa kedua program desentralisasi untuk otonomi daerah, kajian evaluatif sekaligus prospektif atas program tersebut amat relevan untuk dilakukan. Jurnal Ilmu Politik AIPI edisi 21, Oktober 2010 ini menyajikan 10 tulisan yang mengupas topik “Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek” dari berbagai perspektif ilmu politik, pemerintahan, administrasi dan berbagai aspek terkait dengan pengelolaan sumber-sumber perekonomian di daerah maupun dalam hubungannya dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Salah satu tengara penting perubahan politik desentralisasi ini ditunjukkan dalam kajian Leo Agustino dan Mohammad Agus Yosuff, yaitu: berlangsung peralihan dari politik lama yang sentralistik ke politik baru yang polisentris. Meski begitu, polisentrisme ternyata menguntungkan hanya mereka yang

memiliki kekuatan (local strongmen) dan uang (bos ekonomi). Dalam perspektif efektifitas program otonomi daerah, Sadu Wasistiono menyarankan perlunya disusun suatu cetak biru desentralisasi berjangka panjang yang didasarkan pada filosofi dan paradigma “desentralisasi berkeimbangan.”

Telaah Made Suwandi menyorot otonomi daerah dan pelayanan publik. Dalam penilaiannya, buruknya kualitas pelayanan publik di daerah selama ini bukan semata-mata kesalahan daerah tetapi juga tidak lepas dari tanggungjawab pusat. Karena itu, salah satu kunci memperbaiki pelayanan publik adalah kesungguhan upaya mensinergikan hubungan pusat dan daerah dalam pemerintahan daerah dengan memperjelas kewenangan dan tanggungjawab penyediaan pelayanan publik di daerah. Masalah lain tentang inovasi pemerintahan daerah ditelaah oleh Irwan Noor. Rendahnya tingkat persaingan dan ketergantungan keuangan pada pusat merupakan beberapa faktor penyebab langkanya inovasi pemerintahan daerah. Namun begitu, merancang suatu inovasi pemerintahan daerah harus benar-benar mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu: kepemimpinan, iklim organisasi dan lingkungan politik.

Dua permasalahan utama lainnya tertuju pada peran politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), dan pemekaran daerah. Sri Budi Eko Wardani mengelaborasi kemajuan dan masalah peran politik perempuan dalam pilkada; dan menunjukkan bahwa tertutupnya proses kandidasi di internal partai politik tetap merupakan penghalang utama bagi perempuan mengikuti kompetisi jabatan kepala daerah selama ini. Dalam telaah Tri Ratnawati soal pemekaran daerah ditandai bahwa meski membuka keterisolasian daerah, pemekaran daerah acap kali berawal dari konflik elit lokal tetapi juga berakhir dengan konflik-konflik baru karena yang terjadi pada dasarnya adalah segregasi spasial dan sosial budaya.

Tulisan-tulisan pada bagian Kasus membahas secara khusus peristiwa dan atau masalah tertentu yang merupakan imbas dari program desentralisasi dan otonomi daerah. I Wayan Gede Suacana mengulas transformasi otonomi daerah di desa Mengwi Kabupaten Badung, Bali. Implikasi transformasi otonomi dalam tata pemerintahan desa telah memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membuat pelayanan publik akuntabel, transparan dan responsif terhadap kepentingan rakyat. Kasus politik kartel dalam pilkada gubernur di Kalimantan Tengah menjadi fokus kajian Kisno Hadi. Dalam kasus ini terungkap tiga mekanisme politik kartel, yaitu: melalui civil society, birokrasi dan elit ekonomi daerah.

Teori

Penemuan sumber-sumber ekonomi baru di daerah ternyata bukan hanya membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan sekitarnya, tetapi juga menimbulkan konflik kelembagaan terutama dalam pengelolaannya. Tri Nuke Pujiastuti membahas kasus ini yang terjadi dengan penemuan baru sumber tambang emas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Otonomi daerah yang telah berlangsung selama ini ternyata juga belum menolong nasib rakyat Papua. Kajian reflektif Dadang Supardan menggambarkan teralienasinya rakyat adat Papua, dan menyarankan perlunya proses sosial rekognisi (afirmative), dialog Jakarta-Papua yang terbuka, dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.